



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 23 / ORT.07 / 3311 / 2022 TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
  - c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road*

- Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :
  - Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
  - Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
  - Menciptakan birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi,

berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

 Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor: DIPA-076.01.2.65716/2022, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

Spodi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 23 / ORT.07 / 3311 / 2022
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

## RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

-				INDIKATOR					PEI	AKSANA	AN (BULA	LN)					KET
NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	****
1	Manajemen Perubahan	1 Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.	<ol> <li>SK Tim Reformasi         Birokrasi di             lingkungan Sekretariat             KPU Kabupaten             Sukoharjo Tahun             2022.     </li> </ol>	1												
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2 Kegiatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.	1	4	V	V	<b>V</b>	V	¥	4	Ą	٧	4	٧	
			3 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo	3 Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo		à											
		Pelaksanaan manajemen perubahan	Sosialisasi Reformasi     Birokrasi melalui     berbagai media	Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang bisa diakses stakholder internal dan eksternal;      Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelapora n pelaksanaan RB di lingkungan KPU		N.			4			3			7		

jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo

NO	AREA PERUBAHAN	PROTATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	AKSANA	AN (BUL	AN)					KET
NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	REI
			Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;		N.						Ŋ					
				Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;													
			3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo:		4					٧							
			1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu;	Persentase (%) penandatangan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN													
:			2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	Persentase (%) pelaporan LHKPN													
			3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	Persentase (%) pelaporan LHKASN													
			4) Pembangunan Zona Integritas	Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi:													
				a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan													
				b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c. Deklarasi													
				pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Sukoharjo													
			4 Internalisasi nilai-nilai i dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Kabupaten Sukoharjo	Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;									A				
				Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;													

WO	AREA PERUBAHAN	VECIATAN	OUR PROPERTAR	INDIKATOR	10 20 3				P	PELAKSANA	AN (BUL	AN)					KET
NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SEE 1
			5 Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;				√				4					
				Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													
		3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Melakukan Monitoring J pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.						4						<b>V</b>	
			2 Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo)	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	¥												
				Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Sukoharjo												٧	
			3 Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada:	Tim RB KPU RI menerima pelaporan:	<b>V</b>									i .			
			1) Tim pengarah di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor;													

A TREE A TREMPETED A STATE	WHOTAMAN	OUR WHOLADAM	INDIKATOR					PEL	AKSANA	AN (BULA	TM)					TATAL ST
AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	KET
		2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo	b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
		3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.	c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit);													
			d. Terisinya LKE Unit di aplikasi PMPRB Online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sampel.													
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;													
Penguatan Peraturan Perundang Undangan/Deregulas i Kebijakan	1 Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	4					4						¥	
	2 Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang- undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi	4	4	V	<b>V</b>	√	4	4	Ñ.	¥	¥	ų.	4	
	Perundang Undangan/Deregulas	Perundang Undangan/Deregulas i Kebijakan  Kebijakan  I Kaskah Dinas Pengaturan dan Berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-	Penguatan Peraturan Perundang Undangan/Deregulas i Kebijakan  Penguatan Peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan dau Penetapan) yang dipandang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-	2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo  3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2) Tersedianya dokumen tindak larjut dari hasi evaluasi RPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sampel.  2) Tersedianya dokumen tindak larjut dari hasi evaluasi Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sampel.  2) Tersedianya dokumen tindak larjut dari hasi evaluasi Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjut dari evaluasi sebelumnya;  Penguatan Peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang dingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjut dari evaluasi sebelumnya;  Penguatan Peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  Z) Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagl, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangan peraturan perundangan lial, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangan peraturan perundangan peraturan perundangan peraturan perundangan lial, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Benetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo  3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sampel.  2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya; Penguatan Peraturan perundangan (Maskah Dinas Pengaturan dan pentapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya; Penguatan Peraturan perundangan (Maskah Dinas Pengaturan dan pentapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  2 Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan dan atau Penetapan yang dipandang tidak relevan lang, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangan (Naskah Dinas Pengaturan dan sakah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo   S. Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo kabupaten Sukoharjo kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Fengaturan dan perundangundangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Pentendangun yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sampel.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjut dari evaluasi sebelumnya;   2 Menyempurnakan / mengu hah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan pengaturan dan berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan pengaturan dan atau Pentengan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tididi atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan pengaturan dan atau Pentengan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tididi atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau disharmonis dengan peraturan pengaturan dan dan atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan dan atau disharmonis dengan peraturan pengaturan dan dan atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Pengaturan dan atau disharmonis dengan peraturan pengaturan dan dan atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Pengaturan dan atau disharmonis dengan peraturan dan dan atau disharmonis dengan dan disharmonis	2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo  3) Kementerian PANRE — Relaiui aplikasi — PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo  3) Kementerian PANRE — Relaiui aplikasi — PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Recana Aksi Agen perundang undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetangan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  2 Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetanan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  2 Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetanan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau diaharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetanan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau diaharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau diaharmonis dengan peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau diaharmonis dengan peraturan perundang-undang-	2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample sample sample.   2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hesil sample	2) Tim Reformasi   Birokrasi KPU   Kabupaten Sukoharjo   Si Kementerian PANRB   melatui spitkasi   PMPRB online bagi   KYU Kabupaten Sukoharjo   C. Lembar Kerja   Evaluasi (LKE Unit);   Kabupaten Sukoharjo   yang ditunjuk sebagai   sample.	2) Tim Reformsai Brioforasi KPU Kabupaten Sukoharjo  3) Kementerian PANEB melalui aplikasi PMFRB online bagi KFU Kabupaten Sukoharjo sample.  2 Terselanya dakupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2 Terselanya dakunan nindak lanjut dari hasil evahuasi Recana Aksi Agen Fevahuasi (LKE Unit) di aplikasi PMFRB Online bagi kebagai sample.  2 Terselanya dokumen tindak lanjut dari hasil evahuasi Recana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, serta pelaksanaan di ingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo serta perundang undangan lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo serta perundang undangan naskah Dinas Pengaturan dan pengaturan dan naskah Penetapan naskah Dinas Pengaturan dan dan dan penetapan di ingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo sertaran dan naskah Penetapan naskah Dinas Pengaturan dan dan dan penetapan di ingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	2   Tim Beformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo 3   Kementerian PANRID melalui aplikasi PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang diturqitik sebagai sample.  2   Tim Beformasi Habupaten Sukoharjo 3   Kementerian PANRID melalui aplikasi PMPRB online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang diturqitik sebagai sample.  2   Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi (LKE Unit) di aplikani PMPRB Online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang emipaki kebagai sample.  2   Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan PMPRB Online bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang emipaki kebagai sample.  4   Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo mendal kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo tingkungan KPU Kabupaten Sukoha	2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo 3) Kementerian PANB melalui apilicasi PMPRB ordine bagi Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2. Tersediany dokumen tindakanjut dari basil evahasa Renoana Aksi Agen Perutahan di dingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2. Tersediany dokumen tindakanjut dari tevahasa Renoana Aksi Agen Perutahana di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditunjuk sebagai sample.  2. Tersediany dokumen tindakanjut dari tevahasa Renoana Aksi Agen Perutahana di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, maya sudah miditakanjut dari evahasa Renoana Aksi Agen Perutahana produk peraturan perundang undangan (Nakah Dinas Pengsturan (Nakah Dinas Pengsturan dan datu Pencetapan) yang dipandingan KPU Kabupaten Sukoharjo  Renegana Aksi Ingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo  Mahapaten Sukoharjo  Jumlah Naskah Dinas Pengsturan dan Pengaturan dan pengaturan dan atau Pencetapan yang dipanding didar relevan disharmonia dengan disharmonia dengan disharmonia dengan disharmonia dengan disharmonia dengan disharmonia dengan peraturan perundang-pengaturan disharmonia dengan disharmonia denga	23 The Reformasi Brokrasi KPU   Kabupaten Sukoharjo   Secana Aksi Harusan RB dan   Secana Harusan	23 Tim Reformasi   Birokrasa KPU     Kabupaten Sukoharjo     Si Kementerina PANRB     Park     Si Kementerina PANRB     Park     Si Kementerina PANRB     Park     Park	Penguatan Peraturan Peratu	21 Time Reformania   Firendromania   Firendr

WO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PE	LAKSANA	AN (BULA	LIV)	116	1111		- 10	KET
NO	AREA PERUBAHAN		SUB REGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RE!
		Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang- undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi	٧	Ą	٧		1	1	1	<b>V</b>	٧	¥	4	<b>V</b>	
		4 Merumuskan berbagai peraturan perundang- undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	٧	4											
		5 Pengelolaan JDIH	1 Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	4	V	4	1	1	1	4	4	4	1	4	1	
			2 Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	Updatenya data JDIH     KPU Kabupaten     Sukoharjo	4	4	4	4	4	<b>V</b>	√.	√	A.	1	4		
3	Penguatan Kelembagaan	1 Evaluasi Organisasi	l FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	l Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;			1			4			V			<b>V</b>	
			2 Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2 Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organiasai kepada KPU RI dan Kemenpan RB						4						4	
		2 Penyesuaian SOTK	Dilaksanakannya     Penyesuaian SOTK     KPU Kabupaten     Sukoharjo sesuai     mandat.	SOTK KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai mandat.	4												
			Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	٧												
4	Penguatan Tata Laksana	Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Penyusunan peta     proses bisnis dan SOP     di lingkungan KPU     Kabupaten Sukoharjo;	Seluruh peta proses     bisnis telah disusun     sesuai dengan     pedoman penyusunan     Peta Proses Bisnis;	V	<b>V</b>	~										
				2 tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;													

jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PE	LAKSANA	AN (BULA	LIN)					KE
	MALIN I DIVUDRILAIN	REMINIAN	SOD AEGIAIAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan													
				4 Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja													
			Evaluasi proses bisr di lingkungan KPU Kabupaten Sukohar	evaluasi terhadap				4									
			3 Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukohar	penjabaran seluruh													
				Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkar dalam SOP;	1											1	
				3 SOP sudah dilegalkan dan													
				4 Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.													
			4 Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukohar	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	1			7									
		Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukohar				4			V			1			4	
			1 Penyampaian Kebijakan/Makluma Layanan/Standar Pelayanan/SOP PID lingkungan KPU Kabupaten Sukohar	Standar Pelayanan, di dan SOP terkait permohonan informas													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR					PEI	AKSANA	AN (BUL	AN)					KE
.10	ALUM PEKUBARAN	ABGIAIAN			KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	The state of
			2 Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;		Meningkatnya kepuasan layanan PID;													
			3 Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	4	Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;						Miles and the second of the se							
			4 Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5	Jumlah sengketa informasi;													
			5 Survei kepuasan pemohon informasi	6	Adanya rekomendasi/pelaksan aan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan													
				7	Indeks kepuasan permohon informasi.													
		3 Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo:	1	Kebijakan internal tata kelola SPBE			1										
			1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di satuan kerja lain;	2	Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)													
			2) Stratregi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;	3	Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;													
			Pemanfaatan     aplikasi terintegrasi;	4	Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													
			4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, ebudgeting)	5	Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													

О	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR					PEI	AKSANA	AN (BULA	AN)					KE
	ALCON I MACORITAIN	Market Little	DUB REGIATAN		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15.0
				6	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan													
			2 Pemanfaatan aplika SPBE administrasi kesekretariatan:	si 1	Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;				√									
			1) Aplikasi tata nasl dinas	kah 2														
			<ol> <li>Aplikasi Manajen Kepegawaian</li> </ol>	nen 3														
			3) Aplikasi Perencanaan	4	Terisinya data aplikasi Penganggaran													
			4) Aplikasi penganggaran	5	Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan													
			5) Aplikasi Keuanga		manajemen kinerja													
			6) Aplikasi Manajen Kinerja 7) Aplikasi Pengada		% Pengadaan melalui aplikasi pengadaan													
			3 Pemanfaatan aplika SPBE pelayanan publik:															
			1) Layanan pengadu Publik	an 1	Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;				4					٧				
			2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2	Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;													
			3) Layanan Whistle Blowing System (WE	38)	Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;													
			4) Layanan Kepemiluan	4	Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:													
					Data pengunjung     dashapkani yagabisa     diakses publik	d/jat	eng/s	ukoha	rjo									

(0)

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PE	LAKSANA	AN (BUL	AN)					KET
	MALER I DICOMINI	REGIATAN	SUB ABARATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I I I
				<ol> <li>Indeks Survei</li> <li>Kepuasan Publik</li> <li>terhadap aplikasi</li> </ol>													
			5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	5 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID KPU Kabupaten Sukoharjo oleh publik													
		Penerapan sistem     kearsipan yang handal	1 Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis,dinamis, manua dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	N					4						٧	
			2 Kerjasama dengan arsip daerah	2 Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
				3 Terdokumentasinya arsip vital													
	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	Pembangunan Sistem Merit	Penerapan     Pengukuran Kinerja     Individu	Seluruh pegawai     memiliki Sasaran     Kinerja Pegawai	4												
				2 Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/ biaya)	1												
				3 Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ Cascading	1												
				4 Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu						¥							
				5 Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP											:	V	
				6 Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment												¥	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEL	AKSANA	AN (BUL	AN)					KE
		Junian		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	N.B.
			Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1 Data Mutasi	7	4	7	<b>V</b>	1	1	<b>V</b>	1	1	V	4	¥	
				2 Data Promosi 3 Data Peserta Assessment													
			3 Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya	<b>V</b>	7	4	4	1	√	. √	4	Я	٧	4	4	
				2 Jumlah Pelanggaran tahun ini													
			4 Perencanaan kebutuhan/	3 Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman Tersedianya dokumen													
			penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Analisis Beban Kerja	√												
			5 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1 Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
				Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi													
			6 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan													
			7 Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
		2 Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung KPU Kabupaten Sukoharjo	1												
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Sistem     Akuntabilitas Kinerja     Instansi Pemerintah	1 Penysunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	4												
			2 Reviu Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	Renstra hasil reviu			<b>V</b>										

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	AKSANA	AN (BUL	AN)					RET
WE.		***************************************		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
			3 Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	Adanya dokumen     penetapan Kinerja     hingga level Eselon IV      Capaian kinerja     merupakan unsur     pemberian Reward &	o√ŝ												
				Punishment Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja	√												
			4 Penyelenggaraan	seluruh pegawai													
			anggaran yang efektif dan efisien	Adanya Program dan kegiatan:	٧												
				Jumlah program     Jumlah kegiatan     Jumlah program     yang mendukung     tercapainya kinerja     utama organisasi													
				Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi													
				Persentase sasaran     Kinerja:     1) Jumlah Sasaran     Kinerja     2) Jumlah Sasaran     Kinerja yang tercapai													
				100% atau lebih 3 Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		- Care											
				1) Jumlah anggaran total     2) Jumlah anggaran yang berhasil													
			5 Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk	direfocusing Adanya aplikasi terintegrasi telah													
			menciptakan	dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													

NO	AREA PERUBAHAN	VECIATAN	GIID UMOLATAN	INDIKATOR					PE	LAKSANA	AN (BUL	(NA)					KET
40	AREA FERUDARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	% Capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo			V			*			4			1	
			7 Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo			4			1			1			٧	
				2 Reviu Lakip KPU Kabupaten Sukoharjo				4				٧				¥	
			8 Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo tepat waktu												N	
		2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi ELapkin;	Terisinya aplikasi eLapkin	4	W.	V	<b>V</b>	4	V	V	1	4	4	٧	1	
				Data e-Lapkin KPU     Kabupaten Sukoharjo     termutakhir	4	<b>V</b>	×	1	4	4	1	1	1	V	V	1	
			Pelatihan SDM     pengelola     Akuntabilitas Kinerja;     dan	% jumlah pegawai     pengelola     akuntabilitas kinerja     yang memperoleh     pelatihan	4												
			Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja:	2 Pengelola PPBJ bersertifikat	4												
			1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN	% Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN	4								į				
	Penguatan Pengawasan	Pembangunan Zona     Integritas di KPU     Kabupaten Sukoharjo	l Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Terbentuknya Tim Zona integritas;	4												
				Di tandatanganinya     Piagam integritas oleh     para pihak dan saksi;     dan     Masuknya KPU     Kabupaten Sukoharjo													
				dalam penilaian WBK/WBBM.													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	LAKSANA	AN (BULA	AN)					KE
		3.500 10063 & 4.001		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
			Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	dilegalkan.	w.												
:			3 Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan													
			4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas  1 Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI	0												
				2 % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI													
				3 Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan													
			5 Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1 Terisinya LKE ZI; dan													
				2 Terisinya PMPRB ZI bagi KPU Kabupaten Sukoharjo yang di tunjuk													
		Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	4												
			Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	V												
				2 Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo; jdiih kpu go i	٧												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	LAKSANA	AN (BUL	LW)					KET
	THE PART OF THE PA	- Internation	OUD REGISTAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	30.00
				3 Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													
			3 Public Campaign Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;													
			4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1 Laporan pengendalian gratifikasi													
				2 Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan													
		3 Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	Pembangunan aplikasi     Whistle Blowing     System di Lingkungan     KPU Kabupaten     Sukoharjo	Tersedianya aplikasi     WBS yang bisa diakses     oleh publik													
				2 Adanya SOP WBS 3 Adanya Pengelola WBS												Ġ.	
			2 Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti													
	i		3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Laporan pengelolan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.													
		4 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1 Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.													
			2 Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	identifikasi benturan												9	

WO.	A Ship A thereby a Track	TENOTA MAN	AND VINATABLE	INDIKATOR					PE	LAKSANA	AN (BUL	AN)					
NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	KE.
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.													
		5 Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Pembangunan Sistem     Pengendalian Interen     Pemerintah (SPIP) di     lingkungan KPU     Kabupaten Sukoharjo	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Sukoharjo	×												
			2 Pelaksanaan SPIP:  1) Lingkungan pengendalian  2) Penilaian risiko  3) Kegiatan pengendalian  4) Informasi dan komunikasi  5) Pemantauan pengendalian intern  3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	4	4	7	7	4	*	4	4	√	V	7	4	
		6 Penanganan pengaduan masyarakat KPU	SPIP.  1 Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya sarana penyampaian pengaduan,	٧												
				2 Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;	4												
				3 Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;	V												
				4 Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;													
			2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti		*											

NO	AREA PERUBAHAN	PECIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	AKSANA	AN (BUL	LN)					KET
NO	AREA FERUBARAN	KEGIATAN		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat													
		7 Peningkatan Integritas Individu	1 Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	4												
			2 Penyampaian LHKASN	lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1												
		8 Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1 Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√												
			2 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018	4												
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa	٧							i					
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Memetakan jenis- jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo baik kepada internal dan eksternal;	W.												
			2 Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:	1 Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan)						The state of the s							

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR					PEI	AKBANA	AN (BUL	AN)					RE
	ALCIA I ENCOREINI	DEVILATAN			KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1) Dasar hukum;	2	Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo		1											
			2) Persyaratan Layanan;	3	Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;	<b>V</b>												
			Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;		Jumlah sengketa pelayanan menurun;													
			4) Jangka waktu penyelesaian layanan;	5	Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu;													
			5) Biaya/tarif;	6	Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)													
			6) Produk layanan;	7	Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal.						•							
			7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10)Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11)Jumlah pelaksana;															
			12)Jaminan pelayanan; 13)Jaminan keamanan; 14)Evaluasi kinerja pelaksana;															

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	LAKBANA	AN (BUL	AN)			7.		KET
au	AND PERUPARAN	REGIATAN		KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11111
			Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 17 TAHUN 2017	Penilaian kinerja.													
		Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	Menciptakan/Melakuk an deregulasi pelayanan/menerapka n Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal:	<ol> <li>Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;</li> </ol>													
			1) Kesesuaian Persyaratan	2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan;													
			<ol> <li>Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> </ol>	3) Adanya SOP Pelayanan													
			3) Kecepatan Waktu Penyelesaian	4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan											}		
			4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar	<li>5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo baik kepada internal dan eksternal;</li>													
			5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi													
			Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	Adanya rekemondasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.      Dilaksanakannya													
				rekomendasi hasil evaluasi.													
			Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke KPU Kabupaten Sukoharjo;	Adanya sosialisasi inovasi													
				jdih.kpu.go.id	l/jat	eng/s	ukoha	rjo									

10	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PEI	LAKSANA	AN (BULA	AN)					RE
				KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<ol> <li>Benchlearning dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;</li> </ol>													
		3 Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan 1 Standar Pelayanan:	Tersedianya Standar     pelayanan sesuai     amanat UU													
			Prasyarat layanan     Sistem Mekanisme														
			Prosedur 3) Produk Layanan														
			4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya/tarif 2 Maklumat pelayanan	Tersedianya Maklumat Pelayanan													
			3 Sistem informasi pelayanan publik	3 Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik					3								
			4 Sarana prasarana dan fasilitas														
			5 Pelayanan Khusus kepada:	5 Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan													
			Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)														
			Ketersediaan     pelayanan kusus bagi     pengguna layanan     berkebutuhan khusus														
			6 Pengelolaan Pengaduan	Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan													
			1) Ketersediaan sarana pengaduan														
			2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara														
L			penyampaian aduan;	jdih.kpu.go.id	1/	ana/a	ukob.	rio					<u> </u>				

.

NO	ATTE A DESCRIPTION ASSAULT	WOOLANAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR					PE	LAKSANA	AN (BUL	AN)					RET
U	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB REGIATAN	KEBERHASILAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan; 7 Penilaian Kinerja beruba sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan 8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan 2) Ketersediaan moto pelayanan 3) Ketersediaan moto pelayanan 4 Atribut Perlayanan: 1) berupa kartu identitas petugas; 2) Kartu tamu; 3) Buku tamu; 4) Petunjuk arah ruang layanan 10 Pelayanan terpadu satu pintu.	7 Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya; 8 Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan  9 Atribut layanan dapat terlihat publik  10 Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU													
		4 Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	Pembangunan Kerja Sama  Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu														
		5 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward and punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward and punishment dalam pelayanan													

Salinan Sesuai dengan Aslinya NUMSEKRI PARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABURATAN SUKOHARJO Ditetapkan di Sukoharjo Pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA